

Daftar Pustaka

- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. Retrieved From [Http://Ovy19.Wordpress.Com](http://Ovy19.Wordpress.Com)
- Astuty Elgia, & Hany, F. E. (2013). "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". *Publika*, 1(2). Retrieved From [Http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Article/4458/42/Article.Pdf](http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Article/4458/42/Article.Pdf)
- Basrowi, & Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro* (Cetakan Pe). Surabaya: Insan Cendekia.
- Dura, J. (2016). "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa , Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", 10, 26–32.
- Faridah, & Bambang, S. (2015). "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa". *Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.
- Febriyanti, R. S., Yulinarti, & Fitriyah, E. (2018). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, Criminal Responsibility Of Notary On Counterfeiting Authentic Deed, 7(2)".
- H.B, S. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Halim, A. (2005). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). "Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes)". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8).
- Husaini, U., & Setiadi Purnomo. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ika Sasti Ferinqawsa, Ak, C. D. B. M., & Lubis, H. (2014). "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). *Junal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*", 14(6). Retrieved From [Http://Ejournal.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Jmbs/Article/View/3991/2036](http://Ejournal.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Jmbs/Article/View/3991/2036)

- Iqsan. (2016). "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur". *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230–240.
- Iznilah, Muhammad L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2013). "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis". *Jurnal Akuntansi*, 84(1), 487–492. Retrieved From <Http://Ir.Obihiro.Ac.Jp/Dspace/Handle/10322/3933>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2011). Ketetapan Mpr Ri Nomor I / Mpr / 2003.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntabilitas Dan Transparansi*. Yogyakarta.
- Medistiara, Y. (2017). Icw Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa. Retrieved From <Https://News.Detik.Com/Berita/D-3596041/Icw-Sebut-Pak-Kades-Paling-Banyak-Korupsi-Dana-Desa>.
- Miftahuddin. (2018). "Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)".
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 1–25. Retrieved From <Http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Bisnis/Article/View/1480>
- Nurcholis, & Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 48(9), 800–809.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Presiden Republik Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat. (2014). Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, (1).

Retrieved From [Http://Www.Dpr.Go.Id/Doksileg/Proses2/Rj2-20171106-094054-7086.Pdf](http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/rj2-20171106-094054-7086.pdf)

- Rustiarini, N. W. (2016). "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa". *Simposium Nasional Akuntansi, 1–18*.
- Sangadji, & Sopiah. (2010). *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sanusi. (N.D.). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartika, D., & Nini. (2018). "Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunuang". *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas, 18(1)*, 19–39.
- Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2011). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh.
- Sumpeno, & Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.
- Syamsudin. (2007). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta: Lipi Press.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2010). "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan, 6(1)*, 30–35.
- Utomo, S. J. (2015). "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa". *Media Trend, 10(1)*, 19–31. <https://doi.org/10.21107/Mediatrend.V10i1.687>
- Werimon, S. (2006). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd)".
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2018). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4(2)*, 148. <https://doi.org/10.19184/Ejeba.V4i2.5356>

Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2017). "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19 (2), 323. <https://doi.org/10.24914/Jeb.V19i2.336>

Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Banyumedia.

Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Dsa*. Jakarta: Salemba Empat.